

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Negara-negara modern sekarang umumnya mempraktekkan demokrasi. Setiap orang memiliki kepentingan yang sama dalam pemerintahan, sesuai dengan persamaan yang mendasari demokrasi. Kemampuan untuk memerintah benar-benar milik setiap orang. Legitimasi dan legalitas kekuasaan negara bersumber dari kekuasaan rakyat ini. Pemilu dipandang sebagai simbol sekaligus ujian demokrasi di sebagian besar negara demokrasi. Hasil pemilu diumumkan dalam lingkungan yang terbuka dan memungkinkan adanya kebebasan berserikat dan pribadi. Pemilu diperkirakan akan menghasilkan wakil-wakil rakyat yang dapat memahami ambisinya, terutama dalam membuat kebijakan dengan sistem kekuasaan bergilir. Ada peserta di setiap pemilihan. Partai politik adalah kandidat dalam pemilu. Dalam pemilu, partai politik mengeluarkan kandidat untuk dipilih oleh pemilih.

Setiap individu dalam periode demokrasi kita memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan suara dan dipilih untuk menduduki jabatan di semua tingkat pemerintahan. Sistem demokrasi telah meningkatkan kesempatan rakyat untuk kebebasan. Keberagaman suku, bahasa, agama, dan budaya masyarakat Indonesia seringkali menimbulkan gesekan dan konflik sosial. Dalam masyarakat multirasial, demokrasi tidak selalu berfungsi dengan baik. Kami memiliki sejumlah masalah. Identitas telah dipengaruhi oleh partai dan kebijakan demokrasi

termasuk pemilihan langsung untuk pemimpin nasional dan daerah. Politisi yang menekankan ciri-ciri seperti suku, ras, agama, dan identitas daerah untuk memenangkan suara adalah mereka yang mempraktikkan *framing* identitas itu. Di banyak negara, *framing* identitas menjadi persoalan utama.

Identitas lain yang ada di masyarakat mungkin akan dilemahkan atau bahkan dihilangkan oleh politik identitas. Identitas lebih bervariasi dan rumit untuk setiap orang, setiap komunitas, setiap kabupaten/kota, dan setiap bangsa. Politisi sengaja menghadirkan persona yang dianggap paling efektif untuk memengaruhi pemilih agar mendukungnya dalam pemilu guna memajukan tujuan politiknya. Keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya menjadi hal yang penting dalam pemilu, baik pemilihan presiden, parlemen, maupun kepala daerah. Hal ini karena menentukan apakah pemilu akan berhasil atau gagal.

Pemilu merupakan salah satu titik balik yang krusial dalam menunjukkan kedaulatan rakyat, dan tanpa kemampuan menyelenggarakan pemilu secara teratur, tidak mungkin ada demokrasi. Oleh karena itu, komponen terpenting dari sistem demokrasi dianggap sebagai pemilihan umum. Pemilihan Kepala Daerah serentak digelar 09 Desember 2020 menyisakan beberapa catatan penting. Pilkada kali ini dirasa menjadi yang terberat dalam sejarah demokrasi di Indonesia, karena pada saat situasi Covid-19 terkhususnya dalam menentukan pemimpin di Kota Medan. Pilkada Kota Medan meninggalkan jejak sejarah dimana adanya *framing* identitas dalam suatu kontestasi politik.

Melalui hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa adanya peran keterlibatan etnis dan agama dalam Pilkada Kota Medan 2020. Kelompok etnis

dan agama turut berperan aktif dalam kehidupan politik. Pembentukan dan penggunaan *framing* identitas dalam Pilwakot Medan 2020 muncul dengan adanya pendekatan Instrumenalisme yang memanfaatkan kondisi yang terjadi di akar rumput untuk kemudian dijadikan sebagai instrumen kekuatan dalam memperoleh kekuasaan. Pembentukan ini diawali dengan serangkaian mengundang Tokoh Ulama Nasional Ustaz Abdul Somad, Kelompok Paguyuban Sosial, dan Elitee-elitee Politik Nasional.

Terjadinya *framing* identitas di ranah public dalam perhelatan demokrasi seperti Pilwakot Medan 2020 merupakan bagian dari strategi politik yang dimainkan pasangan calon. Selain peran besar kelompok etnis dalam mengkampanyekan pasangan calon, ada juga keterlibatan kelompok agama seperti Forum Ustaz dan Dai Muda Kota Medan, dan Warsila. Selain itu, tim kampanye sering pergi ke tempat-tempat keagamaan untuk memenangkan hati publik dan pemilih. *Framing* identitas tidak bisa diabaikan begitu saja. Namun demikian, kita tidak punya pilihan selain menyadarinya.

Sains harus mengatur *framing* identitas, bukan hanya menghapusnya dalam karya. Identitas pada dasarnya fleksibel dan bervariasi. Framing identitas, bagaimanapun, bertujuan untuk menyeragamkan dan melembagakan identitas dalam masyarakat. Kontrol identitas memerlukan pemulihan ke keadaan aslinya yang dinamis. akademisi maupun non akademisi mulai tertarik mempelajari *framing* identitas etnis dan agama. Peran *framing* identitas etnis dan agama, menurut penulis, sangat penting untuk diperhatikan karena kehadirannya dalam ruang demokrasi berdampak luas. Struktur-bijaksana, etnisitas dan agama